
**SIKAP MUHAMMADIYAH ATAS KEBIJAKAN NIPPONISASI PADA ERA
KEPENDUDUKAN JEPANG DI HINDIA BELANDA: TINJAUAN NORMATIF
KINGDON**

Oleh

Nany Widiastuti¹, Rokaiyah², Srie Devie Melavenic³, Syahbudi Rahman⁴, Ma'mun Murod
Al-Barbasy^{5*}

^{1,2,3,4,5}Magister Ilmu administrasi – FISIP- Universitas Muhammadiyah Jakarta

Email: [5mamun.murod@umj.ac.id](mailto:mamun.murod@umj.ac.id)

Abstrak

Kemenangan tentara Jepang pada Perang Pasifik dengan barat dan sekutu menjadi jalan untuk memasuki negara-negara Asia, termasuk Hindia Belanda (Indonesia). Jepang menganggap dirinya saudara tua dan disambut gembira oleh rakyat Hindia Belanda (Dikemudian hari mengecewakan rakyat Hindia Belanda) .

Periodesasi kependudukan Jepang di Hindia Belanda pada tahun 1942 – 1945 diawal kedatangan Jepang melakukan tiga kebijakan besar terhadap umat Islam Hindia Belanda (Indonesia). Nipponisasi, mobilisasi pergerakan massa, hingga membentuk organisasi-organisasi baru. Terkait kebijakan Pemerintah Jepang tersebut mendapat respon yang baik dari para tokoh-tokoh Islam, NU, persis, hingga Muhammadiyah. Para pemimpin Islam dari berbagai organisasi islam memilih bekerjasama dengan Pemerintah Jepang disertai mengkonsolidasikan kekuatan rakyat dan menunggu waktu yang tepat ketika Pemerintah Jepang lemah.

Penelitian kami bagaimana periodesasi Muhammadiyah era kependudukan Jepang pada tahun 1942 - 1945. Bagaimana upaya Muhammadiyah memberikan warna masyarakat islam yang moderat untuk berjuang pada saat kependudukan Jepang, dimana Jepang menaruh perhatian terhadap islam terkait dengan kebijakan Jepang untuk merangkul islam dalam memperkuat Asia Timur menghadapi sekutu .

Agenda setting Muhammadiyah pada kebijakan Nipponisasi era kependudukan Jepang ini menjadi arah permasalahan dengan pembatasan masalah diidentifikasi sebagai berikut:

(1) Bagaimanakah Muhammadiyah melakukan agenda setting kemuhammadiyahan atas kebijakan nipponisasi kependudukan Jepang; (2) Faktor faktor apakah yang menjadi pendukung agenda setting Muhammadiyah atas kebijakan nipponisasi kependudukan Jepang; (3) Upaya upaya apakah yang dilakukan Muhammadiyah dalam merespon kebijakan nipponisasi kependudukan Jepang.

Teori Agenda Setting dari John W. Kingdon kami gunakan karena ketepatan teori agenda setting pada isu isu publik yang dibangun Muhammadiyah atas Kebijakan Nipponisasi Kependudukan Jepang. Menurut John W Kingdon terdapat tiga aliran di dalam tahapan agenda setting, antara lain : aliran masalah (problem stream), aliran kebijakan (policy stream), dan aliran politik (political stream). Melalui ketiga aliran tersebut permasalahan dibedah menjadi isu-isu berproses sehingga menjadi kebijakan publik.

Teori agenda setting menganggap bahwa masyarakat akan belajar mengenai isu-isu apa, dan bagaimana isu-isu tersebut di susun berdasarkan tingkat kepentingannya (Effendy, 2001).

Penelitian bagaimana agenda setting Muhammadiyah dalam menghadapi kebijakan Nipponisasi era kependudukan Jepang di Indonesia (1942-1945) dengan penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat kualitatif. Metode yang digunakan yaitu metode sejarah dan menggunakan pendekatan kebijakan publik. Penelitian ini bermaksud mengkaji kebijakan luar negeri pemerintah Jepang dan reaksi Muhammadiyah terhadap kebijakan pemerintah Jepang.

Kata Kunci : Agenda Setting, Kebijakan Publik, Proses Kebijakan, Aktor Kebijakan, Opini Publik

PENDAHULUAN

Latar belakang

Interaksi awal Jepang bermula pada masa pendudukan Jepang (1942-1945). Keberadaan Jepang berada di Hindia Belanda pada upayanya mendapatkan sumber daya dalam perang mereka di Asia dan Pasifik. Sebelum menduduki Hindia Belanda, Jepang tertarik terhadap Islam awal 1930an, hal ini dimulai dengan tindakan strategik Pemerintah Jepang kepada Islam melalui promosi kajian Islam dan menjalin relasi dengan para pemimpin Islam di Asia. Disusul Tahun 1938 Pemerintah Jepang membuat Perhimpunan Islam Jepang, dan kemudian setahun berselang melakukan konferensi dan pameran Islam sedunia di Tokyo mengundang tokoh dari berbagai Negara.

Keberhasilan Jepang menyelenggarakan program internasional Pameran Islam di Tokyo dan Osaka pada tanggal 5-29 November 1939 merupakan upaya Angkatan Darat Jepang dengan kebijakan ekspansinya ke negara-negara asia berpenduduk Muslim. Hingga Pada tahun 1942 awal pendudukan Jepang ke Hindia Belanda (Indonesia). Pada saat itu Jepang melihat Muhammadiyah sebagai representasi yang berkaitan dengan sebuah konsep negara, kependudukan, masyarakat muslim, dan kalangan cendekiawan.

Kebijakan luar negeri yang dilakukan Jepang pada saat ekspansi ke Hindia Belanda (Indonesia) melalui pendalaman agenda setting islam pada kebijakan yang akan diterapkan Jepang melalui Nipponisasi negara negara berpenduduk muslim. Jepang dengan agenda setting mempelajari islam terlebih dahulu dimulai sejak 1939 dengan membuat agenda seminar islam di Tokyo, lalu pada tahun 1942 formulasi kebijakan luar negeri yang sudah dipersiapkan Jepang masuk ke Hindia Belanda. Pada saat pendudukan Jepang ini golongan ulama dan santri ikut berperan

menjadi stakeholder , aktor kebijakan dalam dinamika politik dan administrasi pemerintahan Jepang pada hubungan yang artifisial.

Kebijakan Luar Negeri Jepang

Kedatangan Jepang ke Hindia Belanda membawa motivasi pembebasan dan kemerdekaan dari geopolitik kebijakan luar negeri pemerintahan kolonial Belanda. Terlebih kebijakan luar negeri Jepang masuk ke Hindia Belanda dengan melalui pengamatan, agenda setting mengumpulkan isu isu publik terkait Hindia Belanda dengan mayoritas muslim yang akan di formulasikan saat Jepang masuk ke Hindia Belanda. Hal ini otomatis membuka wacana Kembali kemerdekaan Hindia Belanda menjadi Republik yang merdeka, bernama Indonesia. Strategi kebijakan luar negeri Jepang untuk mendapatkan simpati dari Hindia Belanda sukses besar. Tentara Jepang disambut dengan suka cita dan pengibaran bendera Jepang dan Indonesia.

Kebijakan luar negeri Jepang dengan kebijakan Nipponisasi Hindia Belanda melalui spirit gerakan Tiga A, yaitu Nippon pemimpin Asia, Nippon pelindung Asia dan Nippon cahaya Asia. Kebijakan Nipponisasi ini massif dilakukan, seperti implementasi kebijakan dengan pendekatan teori Edward III, ada empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: (1) komunikasi (2) sumber daya (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi.

Implementasi Kebijakan luar negeri Jepang ini dengan melakukan variabel komunikasi melalui kampanye slogan , dan disposisi mengenai waktu yang dimulai sejak Mei sampai Desember 1942, dan pada implementasinya, variabel struktur birokrasi dilakukan kepada Hindia Belanda saat itu belum jadi Republik Indonesia. Kebijakan Nipponisasi terkait dengan melakukan pelarangan semua organisasi rakyat.

Dilakukan penggantian berdasarkan disposisi dari struktur birokrasi, dan melakukan pendirian gerakan-gerakan semisal Djawa Hooko Kai (Kebaktian Rakyat Jawa), Pusat Tenaga Rakyat (Putera) dan lain- lain.

Jepang dengan kebijakan luar negeri melalui elemen sumber daya dalam usaha propaganda Jepang membentuk Pusat Tenaga Rakyat (Putera), dipimpin pemuda Hindia Belanda dikenal dengan Empat Serangkai, kombinasi antara kalangan nasionalis dan Islam.

Kebijakan luar negeri jepang dengan propaganda menarik simpati rakyat Hindia Belanda yang ingin merdeka dari kolonial Belanda dengan merumuskan umat Islam dan para ulama memiliki peran sebagai simpul-simpul kekuatan. Jepang meyakinkan diri umat islam di Hindia Belanda dapat membantu Jepang dalam berperang melawan barat.

Kebijakan luar negeri Jepang dengan mempersatukan organisasi-organisasi Islam pada satu organisasi secara menyeluruh pada tujuannya untuk mengukuhkan eksistensi kepentingan kebijakan luar negeri Jepang atas Hindia Belanda (Indonesia).

Perumusan Masalah

Dari pembatasan masalah dan pengidentifikasian, ditemukan rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Muhammadiyah melakukan agenda setting terkait kebijakan Nipponisasi dalam kependudukan Jepang di tanah air dengan internalisasi islam yang paradoksal pada kebijakan pemerintah Jepang

Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan dari permasalahan ini, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Muhammadiyah melalui agenda setting Kebijakan Muhammadiyah atas kebijakan Nipponisasi kependudukan Jepang di Hindia Belanda (Indonesia).

LANDASAN TEORI

Teori Agenda Setting

Teori Agenda setting menurut Mc Combs dan Donald Shaw adalah apa yang

dianggap penting bagi media maka dianggap penting juga oleh publik oleh karena itu jika media massa memberi perhatian pada berita tertentu dan mengabaikan yang lainnya maka memiliki pengaruh terhadap pendapat publik. Teori agenda setting menganggap bahwa masyarakat akan belajar mengenai isu-isu apa, dan bagaimana isu-isu tersebut di susun berdasarkan tingkat kepentingannya (Effendy, 2001).

Pada prosesnya, *Agenda Setting* dapat dibagi menjadi tiga sub area; agenda media, agenda publik dan agenda kebijakan. Agenda Publik merupakan sub area yang mencoba memahami bagaimana opini publik dipengaruhi oleh konten media massa. Sedangkan *Agenda Setting* media sendiri merupakan studi yang menekankan pada konten media yang berhubungan dengan definisi isu, seleksi dan penekanan yang dilakukan media. Agenda Kebijakan atau *Policy Agenda* berkaitan dengan relasi antara opini publik pada kebijakan elite, keputusan dan aksi (Rogers dan Dearing, 1988:566).

Agenda Setting merupakan bagaimana menciptakan kesadaran masyarakat (*public awareness*) dengan menekankan sebuah isu publik yang dianggap prioritas untuk dilihat, didengar, dibaca, dan dipercaya di media massa. *Agenda setting* terjadi melalui proses kognitif yang dikenal sebagai "aksesibilitas". Aksesibilitas menyiratkan bahwa makin sering dan menonjol media berita meliput suatu masalah, makin banyak contoh masalah yang dapat diakses dalam ingatan audiens. Ketika responden ditanya tentang masalah terpenting yang dihadapi negara, mereka menjawab dengan isu berita yang paling mudah diakses dalam ingatan, yang biasanya merupakan isu yang paling menjadi fokus media berita.

Efek penetapan agenda bukanlah hasil dari menerima satu atau beberapa pesan, tetapi karena dampak agregat dari sejumlah besar pesan yang semuanya berhubungan dengan masalah umum yang sama. Liputan media massa pada umumnya dan *agenda setting* secara khususnya juga memiliki dampak yang kuat pada apa yang individu

pikirkan tentang pemikiran orang lain, dan karenanya cenderung lebih mementingkan isu-isu yang telah diliput secara luas oleh media massa.

Teori Agenda Setting Kingdon

Teori dalam penelitian ini menggunakan Teori *Agenda Setting* dari John W. Kingdon. Teori ini menjelaskan persoalan-persoalan yang berada di masyarakat dan menjadi fokus perhatian pemerintah (Kingdon, 1984). Berawal dari sebuah isu publik yang menjadi masalah (*problems*).

Dalam Teori *Agenda Setting* ada dua faktor penting, yaitu: faktor partisipan/aktor dan faktor proses. Faktor proses terbagi menjadi tiga arus, yaitu: arus masalah (*problem stream*), arus kebijakan (*policy stream*), dan arus politik (*political stream*) dalam proses *agenda setting*.

Ketiga arus itu memiliki artian menjadi, Arus Masalah (*Problem Stream*) merujuk pada persepsi masalah sebagai masalah publik yang memerlukan tindakan pemerintah dan upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang sudah menjadi isu publik. Arus Kebijakan (*policy stream*) merujuk pada solusi yang peneliti, komunitas kebijakan, pakar dalam rangka merespon persoalan. Pada proses ini masalah publik telah mulai bergerak menjadi masalah institusional dan proses kebijakan akan mulai masuk agenda kebijakan. Arus Politik (*Politics Stream*) terdiri dari banyak faktor, seperti perubahan kondisi nasional atas kebijakan luar negeri Jepang, dengan kebijakan Nipponisasi yang dilakukan Jepang, perubahan tindakan strategik Jepang dalam melakukan struktur birokrasi mengakar melalui dilibatkannya organisasi Islam dan umat pada kebijakan luar negeri Jepang di dalam negeri Hindia Belanda dan kampanye-kampanye yang massif bersifat menekan kelompok masyarakat berkepentingan atas Kebijakan Jepang pada Kebijakan luar negeri saat itu dalam melawab barat dan sekutu.

Dalam konsep yang dijelaskan Kingdon, ketika permasalahan teridentifikasi, merumuskan

solusi dan kondisi perubahan dengan kebijakan politik Jepang atas Hindia Belanda.

Teori Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri secara umum dapat diartikan sebagai sebuah tindakan atau strategi yang digunakan satu negara dalam berinteraksi dengan negara lain guna untuk mencapai kepentingannya. Menurut Webber dan Smith kebijakan luar negeri adalah sebuah kebijakan yang terdiri dari upaya mencapai tujuan, nilai, pengambilan keputusan, dan tindakan yang diambil oleh negara dimana pemerintah sebagian besar mengambil andil dalam bertindak dengan pihak luar atau lingkungan eksternal, selain itu turut mengontrol masyarakat dalam berinteraksi dengan lingkungan luar. Menurut Kegley dan Wittkopf kebijakan luar negeri ialah sebuah kebijakan pemerintah yang berwenang terhadap lingkungan internasional yang didasari adanya kepentingan dan tujuan nasional serta terdapat nilai-nilai dan instrumen dalam mengejar tujuan tersebut.

Pada teori K.J Holsti, kebijakan luar negeri merupakan suatu ide serta gagasan dalam membentuk suatu rumusan dengan tujuan untuk memecahkan adanya suatu permasalahan maupun bertujuan untuk melakukan perubahan – perubahan dalam suatu wilayah.

Adanya perbedaan-perbedaan tujuan maupun perbedaan kebijakan setiap negara, dengan adanya kebijakan luar negeri setiap negara harus menyamakan dan memiliki kesepahaman dalam melakukan kerjasama, hal ini dilakukan untuk mencapai dan memenuhi kebutuhan pribadi maupun kepentingan kolektif. Kebijakan luar negeri merupakan salah satu langkah yang dilakukan setiap negara, untuk mendapatkan keuntungan dengan cara mempengaruhi negara lain, mendapatkan prestis serta bertujuan untuk menjaga keamanan bersama. Dalam teori kebijakan luar negeri terdapat tiga rumusan yang menjadi tujuan dari adanya suatu negara untuk membentuk maupun melakukan kebijakan luar negeri, diantaranya;

1. Nilai, pada tujuan suatu negara merupakan salah satu faktor penting dari adanya dorongan untuk merumuskan kebijakan luar negeri. Hal ini karena, kebijakan luar negeri dirumuskan dan dilaksanakan dengan berdasarkan pada tujuan suatu negara.
2. Unsur waktu, dalam melakukan kebijakan luar negeri terdapat unsur waktu yang targetnya harus terpenuhi dalam melakukan pencapaian tujuan.
3. Jenis tuntutan tujuan, merupakan salah satu tuntutan yang harus dijalankan oleh negara anggota dalam waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan. (K.J Holsti.1983)
4. Dalam kapabilitasnya merancang maupun melaksanakan setiap kebijakan luar negeri, negara memiliki dasar serta rangkaian – rangkaian asumsi maupun tujuan-tujuan tertentu dengan mempertimbangkan keamanan skala nasional.

Sedangkan komponen yang dipakai dalam kebijakan luar negeri adalah adanya pandangan, sikap yang dilakukan atau dimiliki oleh negara lain, keputusan- keputusan dan tindakan yang harus dilakukan berdasarkan pertimbangan yang sesuai. (K.J Holsti.1983)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan luar negeri Jepang dengan melakukan ekspansi pada negara berpenduduk mayoritas muslim, bukan sekedar ekspansi Jepang tapi dibalik itu Jepang meyakini Hindia Belanda saat itu bisa membantu Jepang melakukan perlawanan pada Barat dan sekutu. Pada teori K.J Holsti, kebijakan luar negeri merupakan suatu ide serta gagasan dalam membentuk suatu rumusan dengan tujuan untuk memecahkan adanya suatu permasalahan maupun bertujuan untuk melakukan perubahan – peubahan dalam suatu wilayah.

Kebijakan Nipponisasi menjadi Langkah kebijakan awal Pemerintah Jepang. Melalui penggunaan bahasa Jepang dijadikan *Lingua Franca Bahasa komunikasi di wilayah*

ekspansi jepang, di Hindia Belanda (Indonesia).

Pada kebijakan Nipponisasi ini, Pemerintah Jepang meyakini melalui pintu masuk bahasa sebuah kebudayaan dapat disusupi dengan lebih cepat. Implementasi kebijakan Nipponisasi Hindia Belanda, dari pengaruh kebudayaan Barat dan Arab.

Hal ini terkait teori kebijakan luar negeri ada tiga rumusan yang menjadi tujuan dari adanya suatu negara untuk membentuk maupun melakukan kebijakan luar negeri, diantaranya;

1. Nilai, pada tujuan Jepang dorongan untuk merumuskan kebijakan luar negeri Jepang. Jepang dengan kebijakan luar negeri merumuskan dan melaksanakan berdasarkan pada tujuan Jepang
2. Unsur waktu, dalam melakukan kebijakan luar negeri Jepang memiliki target waktu untuk mempengaruhi Hindia Belanda (Indonesia) membantu Jepang pada tujuan peperangan Asia Timur.
3. Jenis tuntutan tujuan, Hindia Belanda (Indonesia) sebagai mitra Jepang memiliki tujuan merdeka menjadi negara. Hal inilah jadi alasan Jepang ekspansi Hindia Belanda untuk membantunya merdeka menjadi Indonesia dengan harapan kekuatan Hindia Belanda ini bisa membantu Jepang melawan Barat dan sekutu pada Perang Asia Timur Raya (K.J Holsti.1983)
4. Dalam kapabilitasnya merancang maupun melaksanakan setiap kebijakan luar negeri, Jepang memiliki dasar serta rangkaian – rangkaian asumsi maupun tujuan-tujuan tertentu dengan mempertimbangkan keamanan skala nasional pada peperangan melawan Barat dan sekutu.

Pergerakan massa dilakukan dengan pendekatan pada tokoh tokoh alim ulama yang dijadikan propagandis (Implementasi Kebijakan, Edward III). Pembentuk organisasi-organisasi bentukan Jepang dengan tujuan mempersiapkan perang dengan barat dan sekutu.

Kebijakan luar negeri Jepang melalui kebijakan Nipponisasi Hindia Belanda mendapat apresiasi Muhammadiyah dengan keberagaman perspektif melalui kedua tokohnya yaitu K.H. Mas Mansur dan Ki Bagus Hadikusumo. Kebijakan pemerintah Jepang dapat diterima oleh K.H Mas Mansur untuk menjaga bersikap kooperatif, tetap berkolaborasi demi agenda setting kebijakan Muhammadiyah atas kebijakan Nipponisasi untuk tujuan masa depan Indonesia. Keberagaman perspektif Muhammadiyah lain hal dengan Ki Bagus yang berbeda menolak kebijakan Pemerintah Jepang. Bukan sebab Kebijakan Nipponisasi yang ditentang Ki Bagus Hadikusuma adalah kebijakan *saikerei* pada rakyat Hindia Belanda.

Arus Permasalahan Kebijakan Nipponisasi Kependudukan Jepang Di Hindia Belanda

Permasalahan *saikerei* termasuk menjadi kebijakan Nipponisasi oleh Pemerintah Jepang pada masyarakat di Hindia Belanda (Indonesia) dengan menyembah matahari, hal ini mendapat pertentangan oleh Ki Bagus. Menurut pandangan Ki Bagus Kebijakan *saikerei* ini merupakan misi penjajah Jepang mengeksploitasi dan mengkaburkan aqidah umat Islam yang menjadi mayoritas di Hindia Belanda. Seperti menghadap matahari untuk membungkukkan badan adalah melakukan penyembahan terhadap matahari, hal inilah menjadi paradoksal aqidah umat muslim. Menurut Ma'mun Murod, banyak faktor yang mempengaruhi sikap dan peran politik Muhammadiyah dalam proses penegakan Syariat Islam. Obyek penyikapan sangat ideologis, yang tentu bagi Muhammadiyah ideologi ini dinilai telah selesai, sehingga tak pantas menampakkan perannya secara demonstratif dengan mengikuti ideologi orang lain.

Muhammadiyah melakukan agenda setting kebijakan Al Islam dan Kemuhammadiyah dari internalisasi *saikerei* ini melalui diplomasi ketauhidan yang menjadi

pegangan umat islam, hingga melalui dakwah umat islam dan media jurnalistik Suara Muhammadiyah. Karena pada kebijakan *saikerei* ini pemerintah jepang harus mengetahui, bahwa dalam hal *saikerei* menjurus kepada perbuatan syirik. Dengan diberikan pengertian secara intelek Pemerintah Jepang melalui Kolonel Tsuda bisa memahami dan hubungan jepang dengan Muhammadiyah terjalin baik.

Arus Agenda Setting Muhammadiyah Atas Kebijakan Nipponisasi Oleh Pemerintah Jepang

Ekspansi Jepang dengan memegang umat islam sebagai mayoritas di Hindia Belanda dengan kedekatan Bersama organisasi islam di Hindia Belanda. Perlahan lahan Jepang mulai menampakkan karakter asli dengan kebijakan Nipponisasi melarang pergerakan politik umat islam dan masyarakat, pentupan media, hingga aksi pemaksaan terkait sumber daya masyarakat Hindia Belanda, seperti menyerahkan padi, atau hasil panen perkebunan.

Muhammadiyah melakukan agenda setting terkait dengan kebijakan Nipponisasi Pemerintah Jepang, dengan menginventarisir isu isu publik untuk di formulasikan dalam kebijakan umat islam dan rakyat Hindia Belanda dalam melawan kesewenang wenangan Jepang. Majalah resmi Muhammadiyah, *Suara Muhammadiyah*, yang sempat dihentikan oleh Jepang antara Januari 1942 hingga Juni 1944, beberapa tahun kemudian *Suara Muhammadiyah* Pada Juli 1944 (Radjab 1363) mulai aktif melalui disposisi Gunseikanbu (Administrasi Militer Pusat Jepang) pada tanggal 20 Desember 2603 (1943). Disposisi ini dengan syarat Jepang memonitor isi majalah Suara Muhammadiyah.

Di samping itu, ada bentuk lain relasi Muhammadiyah dengan Jepang pada masa ini, yakni dimasukkannya tokoh Muhammadiyah dalam usaha propaganda Jepang. Hingga Pada tahun 1943 Jepang membentuk Pusat Tenaga Rakyat (Putera), lembaga yang dipimpin para pemimpin Indonesia dengan tujuan untuk

membantu Jepang dalam melawan Sekutu. Pimpinan badan ini dikenal sebagai Empat Serangkai, dan mencerminkan kombinasi antara kalangan nasionalis dan Islam. Muhammadiyah mulai membangun agenda setting kebijakan kemuhammadiyah ini dengan internalisasi nilai-nilai ajaran Islam melalui media majalah Suara Muhammadiyah.

Arus Politik Kebijakan Muhammadiyah Pada Kebijakan Nipponisasi Pemerintah Jepang

Kebijakan Muhammadiyah atas kependudukan Jepang secara politik. Ketika tokoh Muhammadiyah berdiaspora dalam usaha propaganda Jepang. Dimana pada tahun 1943 Pemerintah Jepang membentuk Pusat Tenaga Rakyat (Putera), yang dipimpin oleh tokoh-tokoh Hindia Belanda untuk tujuan untuk membantu Jepang dalam melawan Sekutu. Empat Serangkai lebih dikenal pada organisasi Putera ini, karena merupakan kombinasi antara kalangan nasionalis ada Soekarno, Mohammad Hatta dan Ki Hajar Dewantoro dan kalangan Islam, diwakili K.H. Mas Mansur. Mas Mansur merupakan Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah dari tahun 1937-1942 sekaligus aktivis pergerakan nasional pada keaktifannya di Sarekat Islam pada masa kolonialisme.

PENUTUP

Kesimpulan

Kebijakan Luar Negeri Jepang di Hindia Belanda (Indonesia) walau hanya berlangsung tiga tahun, mulai 1942-1945, namun banyak hal yang membuat perubahan pada Hindia Belanda sebagai bangsa yang ingin merdeka dan dilematisnya Jepang ketika kekurangan sumber daya untuk berperang dengan barat.

Muhammadiyah pada era kependudukan Jepang mengidentifikasi kebijakan luar negeri Jepang, lewat Nipponisasi berbagai bidang. Melalui teori Kingdon ditemukan Arus masalah (Problem Stream) bagaimana Nipponisasi dengan seikerei menyembah pada matahari ini berdampak pada ketauhidan masyarakat

muslim sebagai mayoritas di Hindia Belanda. Dan Muhammadiyah melakukan protes pada kaisar Jepang karena ideologis Islam itu sudah final bukan dengan menipponisasikan masyarakat muslim. Permasalahan ini terkait dengan aqidah umat Islam di Hindia Belanda menjadi satu arus masalah pada kebijakan luar negeri Jepang di Hindia Belanda (Indonesia). Kaisar Jepang bisa memahami protes Muhammadiyah sebagai penghargaan Jepang atas ketauhidan yang dianut mayoritas masyarakat Muslim di Hindia Belanda.

Pada saat tawaran Jepang pada Muhammadiyah untuk bergabung Bersama PUTERA, Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah saat itu, K.H. Mas Mansur dilematis atas tawaran dirinya sebagai pemimpin PUTERA karena satu sisi K.H. Mas Mansur sedang menjabat Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah. Atas pertimbangan agenda setting sikap Muhammadiyah demi negara, K. H. Mas Mansur menerima tawaran untuk duduk bersama-sama memimpin PUTERA (Saleh Said, t.th: 21).

Bergabungnya KH Mas Mansur ke PUTERA, K.H. Mas Mansur memikirkan Langkah strategis bagaimana kebijakan luar negeri Jepang harus diantisipasi dan disiasati Muhammadiyah sebagai bagian agenda setting kebijakan Muhammadiyah pada kebijakan luar negeri Jepang.

Arus Kebijakan (Policy Stream)

Kebijakan Pemerintah Jepang dalam memanfaatkan pengaruhnya pada geopolitik internasional Jepang di Asia, dengan melakukan mobilisir Umat Islam sebagai mayoritas di Hindia Belanda demi kepentingan Jepang mempersiapkan pada peperangan melawan barat dan sekutu. Muhammadiyah mensiasati Arus kebijakan Nipponisasi seluruh elemen kehidupan umat Islam dan rakyat di Hindia Belanda, dengan meng-counter kebijakan yang sifatnya final seperti ketauhidan pada keyakinan muslim tidak menyembah matahari melalui seikerei.

Arus Politik (Political Stream) Muhammadiyah ini melalui diaspora ke organisasi PUTERA, sangat strategik untuk

merubah dari dalam pada kebijakan Nipponisasi Jepang. Hal ini mendapat harapan dan perhatian masyarakat Hindia Belanda terhadap PUTERA dalam mencari berbagai bantuan dan kedaulatan di internasional sebagai bagian dari melawan kolonialisme. Masyarakat muslim dan hindia Belanda menyerbu Markas besar PUTERA untuk bekerja Bersama PUTERA, dalam hal ini menunjukkan indikator harapan tinggi rakyat Hindia Belanda pada PUTERA.

Komitemen Muhammadiyah dengan kepemimpinan K.H Mas Mansur dalam persoalan ideologi islam tidak dapat ditawarkan, dimana terdapat unsur-unsur lain yang hendak menggerogoti kemurnian aqidah yang telah berjalan mapan di kalangan masyarakat muslim. Sikap tegas Muhammadiyah melalui kepemimpinan Ketua K.H Mas Mansur ditunjukkan K.H Mas Mansur setiap gelar diskusi yang dihadiri oleh para pemimpin Islam dan wakil-wakil Jepang.

Posisi Jepang semakin menurun, akibat peperangan yang terus menerus dengan barat dan sekutu, hingga saat Hiroshima dan Nagasaki mendapat serangan bom atom oleh barat dan sekutu, kedaulatan Jepang atas internasional runtuh dan otomatis berakhir masa pendudukan Jepang di Hindia Belanda (Indonesia) , membawa arah baru Hindia Belanda menjadi negara merdeka, walau pun pada paska masa kependudukan jepang berakhir, Hindia Belanda dengan dibonceng sekutu kembali ingin merebut Hindia Belanda sebagai negara jajahan Belanda.

Masa kependudukan Jepang ini memberikan kesadaran pada kelompok kelompok masyarakat di Hindia Belanda yang menguat mengakar rasa dan identitas sebagai sebuah bangsa yang berproses dan bertransisi sejak kolialisasi membumi di Hindia Belanda mencari identitas pemersatunya. Muhammadiyah memandang bangsa adalah identitas kelompok menciptakan perubahan atas nasib masyarakatnya dengan negara yang merdeka diakui internasional.

Peran Muhammadiyah atas kebangsaan tidak perlu diragukan lagi, bagaimana konsolidasi identitas atas kolialisasi dengan memberdayaan umat, memberikan pemerataan akses Pendidikan serta pelayanan Kesehatan pada masyarakat. Peran kebangsaan Muhammadiyah terus bekerja tanpa Lelah membangun peradaban kebangsaan bersama sama dengan logika yang sama pada capaian tujuan-tujuan mulia demi bangsa dan negara. Hubungan Muhammadiyah dan Jepang terus berlanjut paska berakhirnya kependudukan Jepang, dalam bentuk yang berbeda, melalui kontribusi dan regulasi berbagai bidang, baik keagamaan, kesehatan maupun pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Miftahur Rohman, 2018, Kebijakan pendidikan islam masa penjajahan jepang, STIT Bustanul ‘Ulum Lampung Tengah
- [2] Meta Sekar Puji Astuti, 2018, Pembentukan Citra Jepang Dalam Masyarakat Indonesia Di Masa Kolonial Belanda (1900 – 1942) Melalui Produk Dan Komoditas Jepang: Studi Kasus Pil Morishita JINTAN, Lensa Budaya, Vol. 13, No. 1, 2018
- [3] Putu Nomy Yasintha, 2017, Peran Media dalam Agenda Setting dalam Permasalahan Transportasi di Jakarta
- [4] Meilinda Adharini, Dr.rer.pol Mada Sukmajati S. IP, MPP, 2017, Perpolitikan Dibalik Proses Agenda Setting Buka Kurung Kasus Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan Di Kabupaten Brebes Tahun 2012-2017 tutup kurung
- [5] Etjung Widhiarto, Slamet Rosyadi, dan Denok Kurniasih, 2016, Studi Formulasi Kebijakan Kartu Banyumas Sehat Di Kabupaten Banyumas
- [6] Suharta, Rudi. April 2014. Pengembangan Produk Andalan Dengan Pendekatan One Village One Product (OVOP) Di Kecamatan Imogiri. Jurnal Riset Daerah. Volume 13, No.1: Page 3-4. Ditemukan pada

- <http://jrd.bantulkab.go.id> 18 September 2015 22.15 WIB
- [8] Jr, Paul J. Larkin. 2012. John Kingdon's "Three Streams" Theory and the Antiterrorism and Effective Death Penalty Act of 1996. *Journal of Law and Politics*. Volume 28: Page 25-26.
- [9] Agus miswanto, s.ag., ma m. zuhron arofi, m.pd. i, 2012, *Sejarah islam dan kemuhammadiyah*, pusat pembinaan dan pengembangan studi islam universitas muhammadiyah magelang.
- [10] Sopanudin, 2016, *Reaksi organisasi islam terhadap kebijakan politik Jepang di Indonesia (1942-1945)*
- [11] Assegaf, Abdurrahman, 2007, *Pendidikan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Suka Press
- [12] J. Benda, Harry, 1980, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit*, Jakarta: Pustaka Jaya,
- [13] Makmur, Djohan, 1993, *Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman penjajahan*, Jakarta: Depdikbud
- [14] Poerbakawatja, Soegarda, 1970, *Pendidikan Dalam Alam Kemerdekaan Indonesia*, Jakarta: Gunung Agung
- [16] Rifa'I, Muhammad, 2011, *Sejarah Pendidikan Nasional*, Yogyakarta: Ar-ruzz Media,
- [17] Salim, Agus, 2007, *Indonesia Belajarlah! Membangun Pendidikan Indonesia*, Yogyakarta: Tiara Wacana
- [18] Setiyadi, 1979, *Pendidikan di Indonesia dari Zaman ke Zaman*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- [19] Yunus, Mahmud, 1995, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Mutiara Sumber Widya
- [20] Zuhairini, dkk, 2000, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: PT. Bumi aksara
- [21] Faza Adhima, 05 November 2014, "Sejarah Indonesia pada Masa Penjajahan Jepang" dalam
- [22] <http://www.slideshare.net>.
- [23] Adaby Darban, Ahmad, dan Mustafa Kemal Pasha, 2000, *Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam (dalam perspektif Historis dan Ideologis)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- [24] Adams, Cindy, 2014, *Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia*, terj. Syamsu Hadi, Jakarta: Yayasan Bung Karno
- [25] Akira, Nagazumi, 1989, *Bangkitnya Nasionalisme Indonesia, Budi Utomo 1908- 1918*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti
- [26] Amin, Mansyur, 1996, *NU dan Ijtihad Politik Kenegaraan*, Yogyakarta: al-Amin Press
- [27] Amin, M. Mansyur, 1996, *Dinamika Islam: Sebuah Transformasi dan Kebangkitan*, Yogyakarta: LPKSM
- [28] Anam, Chairul, 1985, *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama*, Solo: Jatayu Sala
- [29] Aqsa, Darul, 2005, *K.H. Mas Mansyur Perjuangan dan Pemikiran 1896-1946*, Jakarta: Penerbit Erlangga
- [30] Ardianto, Elvinaro, 2007, *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*, Bandung: Simbosa Rekatama Media
- [31] Awwas, Irwan S, 2008, *Trilogi Kepemimpinan Negara Islam Indonesia: Mengungkap Perjuangan Umat Islam dan Penghinaan Kaum Nasionalis-Sekuler*, Yogyakarta: USWAH
- [32] Aziz Thaha, Abdul, 1996, *Islam dan Tatanegara dalam Politik Orde Baru*, Jakarta: Gema Insani Press
- [33] Benda, Harry J, 1980, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit Islam Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang*, terj. Dhaniel Dhakidae, Jakarta: Dunia Pustaka Jaya
- [34] Boland, B.J, 1985, *Pergumulan Islam di Indonesia 1945-1972*, terj. Safrodin Bahar, Jakarta: Grafiti Press
- [35] Amin. H.M. dkk., 1989, *Sekilas Sejarah tentang Sejarah Perjuangan Rakyat Kampar dan Sekitarnya Ketika Merebut/Mengisi Kemerdekaan Indonesia Tahun 1900-1968*. Air Tiris: Tanpa Penerbit

- [36] _____, 2006, Sejarah Perjuangan Rakyat Kampar. Bangkinang: Tanpa Penerbit,
- [37] Asany, Ali Munir.,1985, Madrasah Diniyah di Kampar. Pekanbaru: L.P. IAIN SUSKA
- [38] Asany, Ali Munir., dkk,2010, Sinar Sang Surya di Bumi Lancang Kuning Sejarah dan Pembaharuan Muhammadiyah Riau. Pekanbaru: PWM Riau
- Asnan, Gusti., 2006, Pemerintahan Sumatera Barat Dari VOC Hingga Reformas. Yogyakarta: Citra Pustaka
- Basri, Hasan.,1985, Menegakkan Merah Putih di Daerah Riau menyambut 40 Tahun Merdeka. Pekanbaru: Yayasan MSI Daerah Tingkat I Benda, Harry J.1985, Bulan Sabit dan Matahari Terbit Islam Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang. Bandung: Dunia Pustaka Jaya
- Budiarjo, Miriam.1981, Partisipasi dan Partai Politik Sebuah Bunga Rampai. Jakarta: PT Gramedia
- Burger, D.H.1960, Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia. Djakarta: P. N. Pradnja Paramita d/h. J.B. Wolters
- [39] Yayasan Pusaka Riau, 2001.Kementerian Penerangan, Republik Indonesia Provinsi Sumatera Tengah. Kuntowidjojo,1994, Periodisasi Sejarah Kesadaran Keagamaan Umat Islam Indonesia: Mitos, Ideologi, dan Ilmu. Yogyakarta: Shalahuddin Press
- Laporan tahun 1954 Djawatan Penerangan Provinsi Sumatera Tengah. Majelis Diktilitbang dan LPI,2010, 1 Abad Muhammadiyah Gagasan Pembaruan Sosial Keagamaan. Jakarta: Kompas Media Nusantara
- [40] Pasha, Mustafa Kamal dan Darban, Ahmad Adaby.2003, Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam dalam Perspektif Historis dan Ideologis. Yogyakarta: LPPI
- Ricklefs, M.C.2005, Sejarah Indonesia Modern. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- [41] Robert, Mirsel,2004, Teori Pergerakan Sosial Kilasan Sejarah dan Catatan Bibliografis.
- [42] Yogyakarta: Naili Printika
- Suminto, Aqib, 1985., Politik Islam Hindia Belanda. Jakarta: LP3E.
- Sutarmo, 1999, Studi Tentang Pandangan dan Pemahaman Dari Sudut Keagamaan Pada
- [43] Masyarakat Kampar. Pekanbaru: P.P. IAIN SUSKA
- _____, Muhammadiyah Gerakan Sosial-Keagamaan Modernis. Yogyakarta: Suara
- [44] Muhammadiyah, 2005. Suwarno, Relasi Muhammadiyah, Islam, dan Negara Kontribusi Muhammadiyah dalam
- [45] Perspektif Sejarah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010. Thohari, Hajriyanto Y., Muhammadiyah dan Pergulatan Politik Islam Modernis. Jakarta:
- [46] PSAP Muhammadiyah, 2005. Tim Universitas Riau, Sejarah Riau Masa Kolonialisme hingga Kemerdekaan. Pekanbaru:
- [47] Sutra Benta Pustaka,82, 2006.
- [48] Suluah, Vol. 16, No. 20, Juni 2015
- [49] Tim Universitas Riau, Sejarah Riau Masa Revolusi Kemerdekaan–Orde Baru. Pekanbaru: Sutra Benta Pustaka, 2006
- [50] TPP Sejarah Riau Unri, Sejarah Riau. Pekanbaru: tanpa penerbit, 1976. Tohirin. Dkk, “Pesantren dan Ulama di Kampar: Studi Dalam Rangka Mewujudkan Kabupaten Kampar Sebagai Wilayah Serambi Mekkah” Laporan Penelitian,
- [51] Pekanbaru: LPP IAIN Suska, 2003. Umar Amin, “Peranan Mahmud Marzuki Dalam Perjuangan Kemerdekaan di Daerah
- [52] Kampar” Laporan Penelitian, Pekanbaru: LPP Universitas Riau, 1982. Waryati, Sri. Dkk., Sejarah

- Perkembangan Muhammadiyah di Aceh. Banda Aceh: BKSNT
- [53] Banda Aceh, 2005. Yusuf, Ahmad. Dkk., *Sejarah Perjuangan Rakyat Riau 1942-2002*. Pekanbaru: Sutra Benta
- [54] Pustaka, 2006. Yusuf J, Muhammad., *Sekilas Sejarah Singkat Muhammadiyah Penyesawan. Penyesawan:*
- [55] Tanpa Penerbit, 1984. PRM Penyesawan Zul Asyri LA, "Pandangan Tokoh-Tokoh Muhammadiyah Riau Tentang Islam Politik di
- [56] Indonesia Pasca Modernitas" Laporan Penelitian, Pekanbaru: P.P. IAIN SUSKA, 2001.
- [57] Damami, Muhammad, *Akar Gerakan Muhammadiyah*, Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2004
- [58] Digdo, A. A. Pringgo, *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, Jakarta: Dian Rakyat, 1986
- [59] Diktilitbang, Majelis, dan LPI PP Muhammadiyah, *1 Abad Muhammadiyah*, Jakarta: Penerbit Kompas, 2010
- [60] Djauhari, Achmad, dkk, *Potret Gerakan Dakwah NU (Hasil Mukernas IV Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama)*, Yogyakarta: PP LDNU Publishing, 2007
- [61] Djoened Poesponegoro, Marwati, dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional IV*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993
- [62] _____, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid V*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993
- [63] _____, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984
- [64] Fathoni, Khoirul, dan Muhammad Zen, *NU Pasca Khittah: Prospek Ukhuwah dengan Muhammadiyah*, Yogyakarta: Madia Widya Mandala, 1999
- [65] Fealy, Greg, *Ijtihat Politik Ulama Sejarah NU 1952-1957*, terj. Farid Wajidi dan Adelina Bachtar, Yogyakarta: LKiS Grup, 2011
- [66] Febriansyah, M. Raihan, dkk, *Muhammadiyah 100 Tahun Menyinari Negeri*, Yogyakarta: Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2013
- [67] Federspiel, Joward. M, *Persatuan Islam: Pembaharuan Islam Indonesia Abad XX*, terj. Yudian W, Asmin, dan Affandi Mochtar, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996
- [68] Feilard, Andree, *NU Vis-a-Vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*,
- [69] Yogyakarta: LKiS, 1999
- [70] Geertz, Clifford, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, terj. Aswab Mahasin, Jakarta: Pustaka Jaya, 198

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN